**PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM:
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP STATUS
KEWARGANEGARAAN, HARTA BERSAMA, DAN HAK WARIS**

**Dewi Aulia Srikandi¹, Yuniar Arini², Dhiya Zalfa 'Atiqoh³, Lingga Hanisya⁴, Sheva Dwi
Novanto Ramadhan⁵, Astika Nurul Hidayah⁶**
dewiauliasrikandi@gmail.com¹, yuniararini24@gmail.com², dhiyazalfaatqoh@gmail.com³,
linggahanisya@gmail.com⁴, dwinovanto30@gmail.com⁵, astika_nh@ump.ac.id⁶
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

***Abstract:** Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) are increasing along with the times. This research discusses the legal implications of mixed marriages, including aspects of citizenship, property ownership, inheritance rights, and the legal consequences of divorce. The research focuses on the legal rules governing mixed marriages in Indonesia, both in the Civil Code, the Marriage Law, and international civil law. The results show that although the law has provided a framework for couples in mixed marriages, there are still various legal challenges that need to be considered, especially in the aspects of legal status recognition, marriage registration, and protection of rights for couples and children born from these marriages. Therefore, a deeper understanding and legal readiness is needed for couples who wish to enter into a mixed marriage in order to anticipate potential legal conflicts in the future.*

***Keywords:** Mixed Marriage, Citizenship, Legal Implications, Asset.*

Abstrak: Perkawinan campuran antara warga negara indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari perkawinan campuran, termasuk aspek kewarganegaraan, kepemilikan harta, hak waris, dan konsekuensi hukum perceraian. Penelitian ini berfokus pada aturan hukum yang mengatur perkawinan campuran di Indonesia, baik dalam KUHPerduta, Undang-Undang Perkawinan, maupun hukum perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan kerangka aturan bagi pasangan dalam perkawinan campuran, masih terdapat berbagai tantangan hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam aspek pengakuan status hukum, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hak bagi pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam serta kesiapan hukum yang matang bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran agar dapat mengantisipasi potensi konflik hukum di masa mendatang.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Implikasi Hukum, Harta.

PENDAHULUAN

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesama. Hidup berdampingan dengan orang lain memungkinkan manusia untuk saling membantu, berbagi, dan memenuhi berbagai kebutuhan, baik secara emosional, sosial, dan ekonomi. Untuk meneruskan keturunannya, manusia melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama dan diakui oleh negara. Bukan hanya menjadi bentuk komitmen antara dua individu tetapi juga memberikan jaminan hukum serta perlindungan bagi pasangan dan keturunannya.

Perkawinan memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Di zaman sekarang ini interaksi antar negara semakin intens, baik dalam bidang Pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan campuran bukan hanya menjadi bentuk penyatuan dua individu dengan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi juga membawa berbagai implikasi hukum yang harus diperhatikan. Aspek kewarganegaraan, status hukum, hak atas harta benda, serta perlindungan hak bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi isu penting yang perlu diatur dengan jelas dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai peraturan hukum terkait perkawinan campuran menjadi sangat penting bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan lintas negara.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Campuran yang berbunyi ‘Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang belainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia’. Perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran menjadi fenomena yang semakin umum seiring perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Berisi Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan melalui metode analisis hukum. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan campuran, termasuk peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aspek hukum perdata internasional terkait nasionalitas, asas domisili, dan asas tempat perkawinan. Sumber data yang digunakan meliputi literatur hukum dan jurnal ilmiah terkait kasus perkawinan campuran. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu hukum yang muncul dalam perkawinan campuran serta Solusi yang dapat diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian dan dasar hukum perkawinan campuran

a. Perkawinan campuran menurut KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdat) mengatur berbagai aspek terkait perkawinan dari sudut pandang hukum perdata di Indonesia, khususnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam konteks perkawinan campuran, KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pasangan yang berasal dari kewarganegaraan berbeda atau memiliki status hukum yang berlainan. Beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang terkait dengan perkawinan campuran antara lain:

Pasal 26 KUHPerdata

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ditempat pernikahan tersebut dilangsungkan. Hal ini berarti pasangan yang menikah diluar Indonesia harus tunduk pada hukum negara tempat pernikahan tersebut terjadi.

Pasal 27 KUHPerdata

Jika perkawinan dilakukan diluar negeri, maka perkawinan tersebut tetap diakui di Indonesia selama memenuhi ketentuan hukum negara tempat pernikahan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, legalitas pernikahan tidak hanya bergantung pada hukum Indonesia, tetapi juga pada peraturan hukum negara tempat berlangsungnya pernikahan.

Pasal 29 KUHPerdata

Apabila pasangan tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta Bersama. Ketentuan ini penting bagi pasangan perkawinan campuran karena dapat mempengaruhi hak kepemilikan harta, baik di Indonesia maupun di negara asal salah satu pasangan. Oleh karena itu pembuatan perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) sering kali disarankan untuk menghindari potensi konflik hukum di kemudian hari.

Pasal 1465 KUHPerdata

Pasal ini mengatur mengenai hak waris bagi pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan. Dalam praktiknya aspek pewarisan dalam perkawinan campuran sering kali memunculkan kerumitan hukum, terutama terkait kepemilikan aset di negara yang berbeda dan perbedaan sistem hukum kewarisan antara negara asal masing-masing pasangan.

KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pasangan campuran dalam mengatur berbagai aspek keperdataan, terutama dalam hal kepemilikan harta, kewajiban suami-istri, serta pewarisan. Dengan memahami ketentuan dalam KUHPerdata pasangan dalam perkawinan campuran dapat lebih siap dalam mengantisipasi berbagai aspek hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dengan demikian, meskipun KUHPerdata telah menjadi dasar hukum perkawinan sebelum adanya UU Perkawinan, beberapa ketentuannya masih memiliki hubungan yang erat dalam konteks perkawinan campuran, khususnya dalam aspek hukum perdata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan.

b. Perkawinan campuran dalam hukum Perdata Internasional

Dalam sistem Perdata Internasional, terdapat beberapa asas utama yang menentukan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran.

Asas Nasionalitas (Lex Patriae)

Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi individu dalam perkawinan adalah hukum dari negara kewarganegaraannya masing-masing. Misalnya, jika seorang warga negara Indonesia (WNI) menikah dengan warga Negara Amerika Serikat (WNA), maka hukum Indonesia tetap berlaku bagi WNI tersebut, sedangkan hukum Amerika berlaku bagi pasangannya.

Asas Domisili (Lex Domicilii)

Status hukum pasangan setelah menikah ditentukan oleh hukum negara tempat mereka berdomisili. Dalam beberapa negara, hukum yang berlaku di perkawinan campuran bukanlah hukum kewarganegaraannya, melainkan hukum negara tempat pasangan berdomisili. Ini berarti, jika pasangan menetap di suatu negara, maka hukum negara tersebut yang akan berlaku dalam

mengatur perkawinan mereka.

Asas Tempat Perkawinan (Lex Loci Celebrationis)

Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan berlangsung. Beberapa negara menerapkan asas ini, yang berarti hukum yang berlaku dalam perkawinan adalah hukum negara tempat perkawinan diselenggarakan. Misalnya, jika pernikahan dilangsungkan di Prancis, maka hukum perkawinan Prancis akan berlaku terhadap perkawinan tersebut.

Konflik hukum dapat muncul jika negara asal suami atau istri tidak mengakui perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum negara lain oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan campuran harus memastikan bahwa pernikahan mereka memenuhi syarat di kedua negara agar terjadi tidak kepastian hukum.

Tantangan dan Akibat Hukum dalam Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Asing

Tantangan hukum dalam perkawinan campuran:

a. Perbedaan sistem hukum antar negara

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda terkait perkawinan. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi pasangan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku adalah asas nasionalitas, asas domisili, asas tempat perkawinan. Jika hukum kedua negara berbeda, pasangan dapat mengalami kebingungan atau bahkan penolakan atas perkawinan mereka.

b. Kesulitan dalam pencatatan dalam pengakuan perkawinan

Agar sah secara hukum, perkawinan campuran harus dicatat sesuai hukum negara masing-masing. Dalam beberapa kasus, negara asal salah satu pasangan mungkin memiliki aturan yang menghambat pengakuan perkawinan campuran.

Misalnya, di Indonesia, pasangan WNI yang menikah di luar negeri harus melaporkan pernikahannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) agar diakui secara hukum. Jika pencatatan tidak dilakukan, pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia.

c. Hak kepemilikan harta

Salah satu tantangan besar dalam perkawinan campuran adalah kepemilikan harta, terutama di negara yang memiliki pembatasan bagi warga negara asing. Di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agrari (UUPA) No 5 Tahun 1960, Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan memiliki tanah jika seorang WNI menikah dengan WNA maka perjanjian pemisahan harta, maka WNI tersebut juga kehilangan haknya untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Untuk mengatasi hal ini, banyak pasangan membuat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta sebelum menikah.

d. Status kewarganegaraan pasangan dan anak

Banyak negara memiliki aturan terkait kewarganegaraan pasangan dan anak hasil perkawinan campuran. Di Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan memungkinkan anak hasil perkawinan campuran memiliki dwi-kewarganegaraan hingga usia 18 tahun. Setelah itu, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Namun, di beberapa negara, dwi-kewarganegaraan tidak diperbolehkan, sehingga naka harus memilih salah satu kewarganegaraan sejak lahir.

e. Hak asuh dan perceraian

Jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, isu hukum yang muncul bisa lebih rumit dibanding perceraian dalam perkawinan biasa. Beberapa tantangan yang sering muncul adalah hukum mana yang berlaku dalam perceraian, hak asuh anak jika orang tua berasal dari negara berbeda, pengakuan putusan perceraian di negara lain.

Akibat hukum dari perkawinan campuran

a. Kewarganegaraan pasangan dan anak

Dalam banyak negara, pasangan asing yang menikah dengan warga negara local dapat memperoleh kewarganegaraan setelah melalui proses naturalisasi. Namun, ada juga negara yang

tetap mempertahankan status kewarganegaraan masing-masing pasangan. Bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, status kewarganegaraan menjadi hal yang bermasalah. Jika warga negara orang tua mereka tidak mengakui dwi-kewarganegaraan, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu tertentu.

b. Status hukum harta bersama

Sistem hukum yang berbeda bisa mempengaruhi bagaimana harta dalam perkawinan campuran dikelola dan diwariskan. Beberapa negara mengadopsi sistem:

- 1) Harta bersama otomatis, dimana semua harta yang diperoleh setelah menikah dianggap sebagai milik Bersama.
- 2) Permisah harta, dimana masing-masing pasangan tetap memiliki harta pribadinya. Di Indonesia, jika pasangan tidak membuat perjanjian pemisahan harta sebelum menikah, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.
- 3) Hak waris dan pewarisan

Perbedaan sistem hukum antar negara juga dapat menimbulkan konflik dalam hal warisan. Di beberapa negara, hukum waris mengikuti sistem hukum nasional masing-masing pasangan. Sementara itu, negara lain menggunakan hukum tempat tinggal terakhir untuk menentukan bagaimana warisan dibagi. Jika tidak ada kejelasan hukum mana yang berlaku sengketa warisan bisa muncul terutama jika ada perbedaan antara hukum agama dan hukum negara yang mengatur warisan.

4) Pengakuan perceraian antar negara

Jika pasangan dalam perkawinan campuran bercerai di satu negara, putusan perceraian tersebut mungkin tidak diakui di negara lainnya. Misalnya, jika pasangan bercerai di negara yang memperbolehkan perceraian sipil, tetapi salah satu pasangan berasal dari negara yang hanya mengakui perceraian berbasis agama maka perceraian tersebut bisa saja dianggap tidak sah. Untuk menghindari masalah ini, banyak pasangan yang memilih untuk melakukan perceraian di negara yang memiliki prosedur hukum yang jelas dan lebih mudah.

Dengan memahami akibat hukum dari perkawinan campuran, pasangan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, seperti membuat perjanjian pranikah atau melakukan pencatatan pernikahan dengan benar, untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kehidupan pernikahan yang aman secara hukum.

Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran

Perlu diketahui bahwa perkawinan campuran memiliki konsekuensi yang beragam, salah satunya ditandai dengan adanya akibat hukum terkait kewarganegaraan bagi seseorang yang telah melakukan perkawinan campuran. Namun setiap negara, hukum yang mengatur tentang perkawinan pasti berbeda. Di Indonesia sendiri tidak secara otomatis orang asing yang menikah dengan orang asli Indonesia akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Demikian pula dengan seorang Wanita yang berkewarganegaraan Indonesia, mereka boleh mempertahankan status kewarganegaraannya, tetapi hal ini akan berdampak kurang baik bagi anak-anak mereka.

Pengaturan tentang kewarganegaraan Indonesia telah melalui proses perubahan. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1958, status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini berdampak buruk bagi hubungan anak dengan ibunya, maka dari itu diperlukan perubahan atas Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama.

Berdasar pada Hukum Perdata Internasional, untuk menentukan status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran, maka bisa dilihat dari sah atau tidaknya perkawinan orang tua si anak. Jika statusnya sah, maka anak tersebut berhak mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun bilamana perkawinan orang tuanya tidak sah maka anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ibunya. Sedangkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran harus terlebih dahulu diketahui apakah ia lahir sebelum Undang-Undang baru berlaku atau sesudah Undang-Undang baru berlaku.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda, hal ini berarti seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran setelah

diberlakukannya Undang-Undang ini mereka memperoleh kewarganegaraan ganda, baik itu kewarganegaraan ibunya maupun ayahnya, hingga mereka berusia 18 tahun atau selambat-lambatnya ia berumur 21 tahun harus berkewarganegaraan tetap. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kewarganegaraan ganda yang hanya boleh dimiliki hingga batas usia 18 tahun saja.

Dengan adanya pemilikan status kewarganegaraan ganda ini, anak hasil perkawinan campuran harus didaftarkan agar bisa mendapatkan akta kelahiran yang sah sehingga mereka juga akan mendapatkan akses pelayanan publik seperti Pendidikan di Indonesia.

Implikasi Yang Timbul Dari Perkawinan Campuran

Pekawinan campuran, yaitu pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), yang menimbulkan beberapa implikasi hukum yang perlu di perhatikan oleh pasangan suami istri. Implikasi ini mencakup status kewarganegaraan anak, status izin tinggal bagi pasangan WNA, kepemilikan aset dan properti, serta hak dan kewajiban yang muncul selama pernikahan berlangsung maupun Ketika pernikahan berakhir. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum yang mengatur perkawinan campuran, pasangan dapat menghadapi berbagai masalah di kemudian hari.

a. Implikasi bagi anak dari perkawinan campuran

Anak hasil dari perkawinan campuran yang telah didaftarkan akan secara otomatis mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang di atur oleh undang-undang. Tak hanya itu anak tersebut juga sudah menjadi bagian dari subjek hukum, sehingga hal inilah yang akan menimbulkan akibat hukum berupa peraturan tentang status kewarganegaraan, misalnya perlindungan terhadap hak-hak kewarganegaraan anak tersebut. Hak ini mencakup hak untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia, dengan syarat memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, termasuk batasan minimal usia.

Ketika anak dengan kewarganegaraan ganda berdomisili di Indonesia dan hendak menikah, mereka wajib memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Selain itu, mereka juga memiliki hak waris atas harta orang tua, asalkan hubungan darah dapat di buktikan melalui status perkawinan orang tua yang sah. Namun, anak dengan kewarganegaraan ganda secara otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia dan asing, sehingga mereka tidak dapat menjadi ahli waris atas harta orang tua terkait kepemilikan hak milik atas tanah. Hal ini di atur dalam pasal 21 ayat (1) UU pokok agrarian, yang menyatakan bahwa “hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”.

Solusinya agar anak dengan kewarganegaraan ganda dapat mewarisi hak milik atas tanah dari orang tua WNI, mereka harus memilih menjadi WNI sebelum berusia 18 tahun, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk melindungi hak-hak hasil perkawinan campuran, undang-undang kewarganegaraan ganda terbatas. Langkah ini menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil, karena anak tersebut memiliki keturunan Indonesia. Perlindungan hukum ini mencegah pelanggaran dan menetapkan Batasan kewajiban anak.

b. Implikasi suami dan istri dalam perkawinan campuran

Salah satu aspek penting dalam perkawinan campuran adalah izin tinggal bagi pasangan WNA. Berdasarkan hukum keimigrasian Indonesia, seorang WNA yang menikahi WNI tidak otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, WNA perlu mengurus Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan setelah memenuhi syarat tertentu, dapat mengajukan Izin Tinggal Tetap (KITAP) agar dapat tinggal secara legal di Indonesia.

Selain masalah izin tinggal, Kepemilikan aset dan properti juga menjadi tanggapan utama dalam perkawinan campuran. Berdasarkan Undang-undang pokok agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960, WNA tidak di perbolehkan memiliki tanah dengan status hak milik di indonesia. Artinya pasangan WNA tidak dapat membeli rumah atau tanah atas nama mereka sendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini, banyak pasangan melakukan cara tertentu, seperti mencatat kepemilikan aset atas nama pasangan WNI atau menggunakan Hak Pakai yang di perbolehkan bagi WNA. Namun, hal ini tetap memiliki resiko hukum, terutama dalam hal warisan atau perceraian. Oleh karena itu, banyak pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan (prenuptial Agreement) yang mengatur pemisahan harta antara suami dan istri. Perjanjiann ini menjadi penting karena dalam sistem hukum Indonesia, jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta yang diperoleh selama di pernikahan dianggap

sebagai harta bersama, yang dapat menimbulkan komplikasi hukum bagi pasangan WNA.

Implikasi perkawinan campuran juga berpengaruh pada Hak dan Kewajiban pasangan saat pernikahan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, di mana WNI sering kali lebih diutamakan dalam mendapatkan hak asuh, terutama jika anak masih berada di bawah umur. Selain itu, pembagian aset bisa menjadi masalah, terutama jika aset seperti rumah atau tanah hanya terdaftar atas nama salah satu pasangan. Dalam beberapa kasus, WNA yang sebelumnya memiliki KITAP berdasarkan pernikahan dapat kehilangan izin tinggalnya setelah bercerai, kecuali jika mereka memiliki sponsor lain, seperti Perusahaan tempat bekerja atau anak kandung yang telah berusia dewasa dan berkewarganegaraan Indonesia

KESIMPULAN

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA memiliki konsekuensi hukum yang kompleks, termasuk dalam hal kewarganegaraan pasangan dan anak, hak kepemilikan harta, serta implikasi hukum saat terjadi perceraian. Penelitian ini menentukan bahwa kendala utama dalam perkawinan campuran meliputi perbedaan sistem hukum antara negara asal pasangan, kesulitan dalam pencatatan dan pengakuan pernikahan, serta pembatasan kepemilikan aset bagi WNA di Indonesia. Untuk menghindari konflik hukum, pasangan dalam perkawinan campuran disarankan untuk memahami secara mendalam peraturan yang berlaku, melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan yang jelas dan kesadaran hukum yang tinggi, pasangan dalam perkawinan campuran dapat menjalani kehidupan pernikahan yang lebih stabil dan aman secara hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179-191.
- Marsella, M. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 176-192.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Dewi, N. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 275-281.
- Ghazaly, J. H. (2019). Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 117-130.
- Jekalaya, I. W., Suradigama, I. W., & Suartini, M. (2024). Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Sutasoma*, 2(2), 98-104.
- Mokoginta, M. M. (2017). Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. *Lex Privatum*, 5(5).
- Nugroho, B. A., Ngurah, I. G. A., & Said, Y. M. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.
- Septiawan, A. A. (2017). Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1), 62-74.
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88-92.
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Bandiyah, I., & Rosando, A. F. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 105-123.
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan

Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Rampay, D. L. (2017). Hak waris anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 107-121.